

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015

Oleh

Sandra Febriyani Nur R.
(14010113120056)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

On December 9, 2015, for the first time, the Government holds simultaneous region head election in 264 regions, one of all is Semarang. The most important thing in the election of Mayor and Vice Mayor is participation from all local citizens who already have voting rights including the voters with a disability.

This research aims to know the forms and factors that influenced the political participation of person with disability in Semarang on the Mayor and Vice Mayor election of Semarang in 2015. The method used in this research is a combination quantitative research and qualitative research method, with the techniques of data collection is questionnaires and interviews. To determine the sample is used accidental sampling, and to determine the subject of research is used purposive sampling. The result showed that there were some forms of political participation of person with disability are joining the campaign, supporting a particular candidate and became a participatory supervisor. Meanwhile, the factors that affect the political participation of person with disability, including data entry, socialization, facilities and accessibility.

The recommendations that can be done by KPU Kota Semarang is doing socialization separately, present an interpreter when socialization, and ensure the tools for disability on the ballot. The recommendation can be done by the family of the person with disability is not hiding their family members with a disability. And the recommendation that can be done by Local Government is improving the database of disability.

Keywords: Political participation, Person with Disability, Mayor election

I. Pendahuluan

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di Indonesia dikenal tiga macam pemilihan umum, yaitu Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah. Pada 9 Desember 2015, untuk pertama kalinya, pemerintah menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak di 264 daerah yaitu di 8 provinsi, 222 kabupaten, dan 34 kota. Secara umum, pilkada serentak hadir sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia.

Salah satu hal penting dalam penyelenggaraan Pilkada adalah partisipasi warga lokal yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih termasuk pemilih dengan disabilitas. Karena kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak bisa terlepas dari partisipasi politik penyandang disabilitas. Mengingat penyandang disabilitas sendiri merupakan segmen strategis dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Namun demikian, meski hak-hak penyandang disabilitas telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person With Disabilities*, tapi pada praktik demokrasi penyandang disabilitas tidak jarang menghadapi beberapa masalah dalam menggunakan hak politiknya.

Dilansir melalui *entertainment.kompas.com* pada 20/06/17 pukul 07:55 WIB, meski sudah ada regulasi yang mengatur tentang pemenuhan hak dan partisipasi kelompok disabilitas dalam politik, namun dalam pelaksanaannya hak penyandang disabilitas masih saja terabaikan. Di mana meski dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 diatur tentang pendataan pemilih hingga proses pemungutan suara yang mengakomodir para penyandang disabilitas tetapi banyak penyandang disabilitas yang ternyata tidak terdaftar. Terlepas buruknya pendataan, warga disabilitas masih kecil di mata statistik. Pilkada serentak 2015 sebagai pemilu pertama yang mempublikasikan *online* pemilih disabilitas, hanya ada 128.839 pemilih. Jika dibanding dengan total pemilih 100.374.317, kekuatan kedaulatan rakyat disabilitas hanya 0,12%. Padahal, *International Labour Organization* (ILO) menginfokan, ada sekitar 15% penyandang disabilitas dari seluruh manusia di dunia ini. Jika penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326, diperkirakan ada 35.646.199 (15%) penyandang disabilitas.

Di Kota Semarang, pada Pilwakot Semarang 2015 hanya ada 557 pemilih dengan disabilitas yang terdaftar dalam DPT dari 1.109.045 pemilih. Jika dilihat dari statusnya sebagai Kota terbesar ke-5 di Indonesia maka jumlah tersebut tentu sangat sedikit. Oleh karena itu dengan meningkatnya jumlah pemilih difabel dalam DPT pada Pilkada 2015, KPU Kota Semarang pun bekerjasama dengan organisasi difabel Kota Semarang untuk melakukan kroscek data pemilih difabel. Di sisi lain, dilansir melalui *jateng.tribunnews.com*, Bawaslu Provinsi Jateng melibatkan komunitas penyandang disabilitas untuk menjadi pengawas partisipatif.

Dari uraian tersebut maka menarik untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang pada Pilwakot Semarang 2015, sekaligus untuk mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang.

II. Metode

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian campuran dengan tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non probability sampling*. Di mana teknik yang digunakan peneliti adalah *accidental sampling*, didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul atau dengan kata lain sampel adalah individu yang mudah ditemui. Sedangkan subyek penelitian dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling*. Di mana subyek penelitian diharapkan dapat secara spesifik memberi pemahaman tentang permasalahan dalam penelitian ini.

III. Hasil Penelitian

3.1 Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilwakot Semarang 2015

Pada Pilwakot Semarang 2015, ada beberapa bentuk partisipasi politik yang muncul dari penyandang disabilitas. Berikut ini akan dijabarkan beberapa bentuk partisipasi penyandang disabilitas pada Pilwakot Semarang 2015, berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan.

1. Kampanye Pemilihan

Salah satu kegiatan yang teragenda pada tahapan Pilkada adalah kampanye pemilihan. Kampanye pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih untuk memilih calon pasangan tertentu.

Peserta dari kampanye itu sendiri adalah masyarakat umum. Dari 76 responden, 11 orang (14,5%) di antaranya menyatakan ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilihan. Sementara sisanya, 65 orang (85,5%) menyatakan tidak ikut kampanye pemilihan. Adapun alasan utama mereka mengikuti kegiatan kampanye adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Alasan Utama Mengikuti Kegiatan Kampanye

No	Alasan Utama	Jumlah	Presentase (%)
1.	Dapat uang/barang lainnya	1	1,3%
2.	Ingin mengetahui visi dan misi paslon	6	7,9%
3.	Afiliasi partai politik	2	2,6%
4.	Untuk kepentingan komunitas	1	1,3%
5.	Paslon intens terhadap penyandang disabilitas	1	1,3%
Total		11	14,5%

Sumber : Data primer (diolah), 2017

2. Mendukung Paslon Tertentu

Dalam konteks ini, mendukung pasangan calon tertentu dapat pula diartikan sebagai menggunakan hak pilih pada hari pencoblosan. Dari 76 responden, 61 orang (80,3%) menyatakan “Ya” sebagai jawaban atas pertanyaan mendukung paslon tertentu. Sementara sisanya 15 orang (19,7%) menyatakan tidak mendukung paslon tertentu. Tiap-tiap responden memiliki alasan tersendiri mengapa mereka mau mendukung paslon tertentu. Sebagian besar menyatakan mendukung karena paslon memiliki visi dan misi yang ideal.

Mayoritas responden mendukung paslon dengan cara memberikan suara pada hari H pencoblosan yaitu sebanyak 52 orang (68,4%). Sementara 7 orang (9,2%) mendukung paslon dengan cara ikut menjadi relawan paslon dan memberikan suara pada hari H pencoblosan. Kemudian 1 orang (1,3%) menyatakan hanya ikut menjadi relawan paslon saja. Sehingga jumlah responden yang mengemukakan bentuk dukungannya terhadap

paslon adalah sebanyak 60 orang. Dengan demikian 1 dari 61 responden yang mendukung paslon tidak menyatakan bentuk dukungan yang ia berikan kepada paslon.

3. Berperan sebagai Pengawas Partisipatif

Konsep dari pengawasan partisipatif itu sendiri adalah di mana masyarakat tidak lagi hanya digiring untuk mencoblos pada hari H melainkan juga terlibat dalam pengawasan pemilu sejak awal. Pengawas partisipatif diharapkan dapat mengawasi jalannya proses pemilu mulai dari masa kampanye, masa tenang, serta pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ada beberapa responden yang menyatakan ikut menjadi pengawas partisipatif pada Pilwakot Semarang 2015. Berikut ini penjelasan mengenai jumlah responden yang ikut menjadi pengawas partisipatif.

Tabel 3.2 Frekuensi Penyandang Disabilitas yang Berperan sebagai Pengawas Partisipatif Pada Pilwakot Semarang 2015

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Presentase (%)
1.	Ya	7	9,2%
2.	Tidak	69	90,8%
Total		76	100%

Sumber : Data primer (diolah), 2017

Dari 7 responden yang ikut berperan sebagai pengawas partisipatif, 5 di antaranya menyatakan bahwa alasan utama mereka ikut berperan serta adalah “ingin mengawal proses Pilwakot Semarang 2015”. Sementara sisanya menjawab “ingin mencari pengalaman”.

3.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pilwakot Semarang 2015

1. Pendataan

Salah satu faktor yang menyebabkan tinggi-rendahnya partisipasi penyandang disabilitas saat Pilkada, di antaranya adalah pendataan. Selama ini, pendataan yang dilakukan oleh petugas kepada penyandang disabilitas banyak menemui kesulitan akibat para petugas kurang memahami kondisi penyandang disabilitas.

Di Kota Semarang, untuk menjamin hak pemilih dengan disabilitas, KPU Kota Semarang melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti organisasi penyandang disabilitas dan Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang dengan organisasi penyandang disabilitas yaitu dalam hal *cross check* jumlah penyandang disabilitas yang sudah dapat memilih pada Pilwakot Semarang 2015. Dengan tujuan, apabila ada penyandang disabilitas yang belum terdaftar sebagai pemilih dapat segera mendaftarkan diri.

Di samping itu, KPU Kota Semarang juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang untuk mengetahui database penyandang disabilitas di Kota Semarang. Karena pihaknya menyadari bahwa selama ini database penyandang disabilitas menjadi penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang. Hal ini terjadi karena tidak jarang keluarga yang memiliki anggota keluarga yang disabilitas tidak terbuka dengan keberadaan anggotanya atau bahkan menganggap individu dengan disabilitas tidak perlu terlibat dalam aktivitas layaknya orang umum.

2. Sosialisasi Pemilihan

Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015, KPU Kota Semarang selaku penyelenggara Pilwakot telah melakukan sosialisasi pemilihan kepada penyandang disabilitas. Di mana pada saat melakukan sosialisasi, KPU Kota Semarang menghimbau kepada penyandang disabilitas agar menggunakan hak suaranya pada hari pencoblosan. Sepanjang acara, peserta diberi banyak pembekalan, terutama cara mencoblos yang baik dan benar. Tak luput, penyajian contoh template surat suara bagi pencoblos tunanetra. Lebih dari

itu, untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang, KPU Kota Semarang membentuk relawan demokrasi.

Sosialisasi pemilihan yang dilakukan baik dari pihak penyelenggara maupun dari pihak relasi ini ternyata ikut memberikan pengaruh terhadap partisipasi penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Pertuni Kota Semarang, Achyani:¹ *“Partisipasi sangat tinggi di Semarang ini, dari Pertuni berangkat semua, soalnya ada sosialisasi. Teman-teman pada menggunakan hak pilih.”*

Dari keterangan tersebut juga dapat identifikasi bahwa penyandang disabilitas yang terlibat dalam organisasi penyandang disabilitas cenderung menggunakan hak pilihnya. Hal ini wajar, sebab pertama, para difabel tunanetra yang tergabung dalam organisasi memiliki kesempatan untuk mengikuti pergaulan secara luas. Di samping faktor pergaulan, para difabel tunanetra yang tergabung dalam organisasi sering pula berkesempatan mengikuti program-program sosialisasi.

3. Fasilitas dan Aksesibilitas

Dalam penelitian ini, fasilitas dioperasionalkan pada alat bantu di TPS. Hasil penelitian di lapangan ada responden yang menyatakan tidak mencoblos dikarenakan tidak menerima template atau surat suara dengan huruf braille. Menariknya, meski ada kesediaan pendampingan tetapi responden ini lebih memilih untuk tidak mencoblos. Di sisi lain, berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, ada responden yang menyatakan bahwa, *“rata-rata teman-teman difabel kesulitan akses lokasi dan alat bantu.”*

Meskipun demikian, mayoritas responden dalam penelitian ini menyatakan “Ya” untuk aksesibilitas TPS. Lebih jelas, perhatikan tabel berikut ini.

¹ Hasil wawancara dengan Ketua Pertuni Kota Semarang pada hari Kamis, 06 April 2017 pukul 11:15 WIB.

Tabel 3.3 Frekuensi Aksesibilitas TPS

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Ya	66	86,8%
2.	Tidak	1	1,3%
Total		67	88,2%

Sumber : Data primer (diolah), 2017

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa dari 76 responden, 67 diantaranya pergi ke TPS pada saat hari pemungutan suara. Biasanya, mereka yang tidak pergi ke TPS adalah penyandang disabilitas lainnya (stroke atau lumpuh). Namun demikian beberapa dari mereka yang tidak pergi ke TPS tetap dapat memberikan hak suaranya, karena adanya kesediaan petugas datang ke rumah pemilih dengan disabilitas untuk melakukan pelayanan pencoblosan di rumah.

IV. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015 adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang 2015 tergolong dalam kategori partisipasi politik kegiatan menonton. Karena mayoritas penyandang disabilitas pada saat Pilwakot Semarang 2015 hanya melakukan pemberian suara saja. Sementara untuk tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang yang menggunakan hak pilihnya tidak diketahui secara pasti. Hanya saja sebuah sumber memaparkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pilwakot Semarang 2015 adalah 58,48%.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang pada Pilwakot Semarang 2015 meliputi pendataan pemilih disabilitas, sosialisasi pemilihan, serta fasilitas dan aksesibilitas TPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Cetakan I*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Amirudin, A. Zaini Bisri. 2006. *Pilkada Langsung; Problem dan Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005, Cetakan I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik, Cetakan Kesatu*. Bandung: Alfabeta.
- Gatara, Sahid. 2008. *Ilmu Politik; Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handoyo, Eko. 2013. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Muladi. 2009. *HAK ASASI MANUSIA; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nadir, Ahmad. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Malang: Averroes Press.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian, Cetakan I*. Jogjakarta: Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke 8*. Bandung: ALFABETA.
- Supriyanto, Didik. 2007. *Menjaga Independensi Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Suryadi, Budi. 2007. *Sosiologi Politik; Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta: Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto dan Topo Santoso. 2008. *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Suswantoro, Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Taufiq, Ahmad. 2014. *Modul; Sampling dan Analisis Data*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Jurnal dan Skripsi:

AGENDA. 2014. Potret Pemilu Akses dalam Pemilihan Presiden 2014 di Indonesia; Hasil Pemantauan di Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, and Sulawesi Selatan. Jakarta: JPPR. Diakses melalui <http://www2.agendaasia.org/index.php/library/report/file/135-potret-pemilu-akses-dalam-pilpres-2014> pada 29 Juni 2016 pukul 21: 20 WIB.

Jurnal The Politics Vol. 1 No. 2, Juli 2015 P-ISSN: 2407-9138. Salim, Ishak. Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. Diakses melalui <http://unhas.ac.id/fisip/wp-content/uploads/2015/12/Jurnal-The-Politics-Vol.1-No.-2-Juli-2015.pdf> pada 30 Juni 2016 pukul 10:09 WIB.

Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi IISN No. 2337-5299 Volume 2/Nomor 1/Tahun 2014/ Hal.89-195. Bandung: FISIP Unikom. Diakses melalui <http://ip.unikom.ac.id/files/Agregasi/Jurnal%20Agregasi%20Volume%20%20tahun%202014.pdf#page=4> pada 22 Agustus 2016 pukul 14:15 WIB.

Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. 2013. Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Cetakan Pertama. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Diunduh melalui <http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/Seri%20demokrasi%20elektoral%2012.pdf> pada 29 April 2016 pukul 12:15 WIB.

Tim Peneliti Perludem. Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu [2009-2014]. Jakarta: 2006.

Zoelva, Hamdan. 2013. Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Website:

<http://kpu-semarangkota.go.id/PEROLEHAN-SUARA-PILWAKOT-2015> diakses pada 22 Oktober 2016 pukul 19:10 WIB.

<http://kpu-semarangkota.go.id/berita/KPU-Fasilitasi-Pemilih-Difabel> diakses pada 23 Oktober 2016 pukul 15:42 WIB.

<http://pamboedifiles.blogspot.co.id/2012/08/peta-administrasi-kota-semarang.html> diunduh 18 Februari 17

<https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/65> 17/03/17 diakses pada 18 Februari 2017 pukul 13:34 WIB.

<http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2016/01/zSDA2014.pdf> 13:58 WIB

<http://www.solopos.com/2015/12/11/hasil-pilkada-solo-tingkat-partisipasi-difabel-hanya-3825-669919>

<http://jateng.tribunnews.com/2015/11/29/bawaslu-libatkan-komunitas-difabel-dan-psk-menjadi-pengawas-partisipatif> dilihat pada Februari 2017.

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf diakses pada 18 Februari 2017.

www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-semarang-jawa-tengah-jateng.html?m=1 diakses pada 18 Februari 17 pukul 13:03 WIB.

<http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2015-12-31> diakses pada 21 Juni 2017 pukul 17:14 WIB.

<http://simgakin.semarangkota.go.id/2015/website/web/pages/119> diakses pada 21 Juni 2017 pukul 07:50 WIB.

https://semarangkota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kota%20Semarang%20dlm%20Angka%202016-wm.pdf diunduh pada 21 Juni 2017 pukul 19:01 WIB.

<http://rumahpemilu.org/id/difabelisme-untuk-pemilu-inklusif/> diakses pada 20 Juni 2017 pukul 15:09 WIB.

<http://harianbhirawa.com/2017/01/menjamin-hak-politik-penyandang-disabilitas/> diakses pada 20 Juni 2017 pukul 15:41 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53bbdc4e6eb55/sosialisasi-pemilu-untuk-penyandang-disabilitas-belum-maksimal> diakses pada 21 Juni 2017 pukul 19:20 WIB.

<http://disospora-pmks.blogspot.co.id/2013/07/profil.html> diakses pada 21 Juni 2017 pukul 19:35 WIB.

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/142159-%5B_Konten_%5D-Konten%20C9983.pdf diakses pada 21 Juni 2017 pukul 20:01 WIB.

<http://semarangkota.go.id/content/image/files/LKjIP%20Kota%20Semarang%20Tahun%202015.pdf> diunduh pada 21 Juni 2017 pukul 20:07 WIB.

http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_JATENG_11_2014.pdf diunduh pada 21 Juni 2017 pukul 20:15 Wib.

<http://kpu-sultengprov.go.id/arsip/2229> diakses pada 22 Juni 2017 pukul 09:30 WIB.

<http://kpud-tasikmalayakab.go.id/sosialisasi-dan-parmas/> diakses pada 22 Juni 2017 pukul 09:24 WIB.

<http://kpu-banjarnegarakab.go.id/file/download/Penelitian-Literasi-Politik.pdf> diakses pada 21 Juni 2017 pukul 18:49 WIB.